



Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jambi

Heni Meidiyan¹, Asrini², Irmanelly³
Universitas Muhammadiyah Jambi^{1,2,3}

*Email:

henimeidiyan25@gmail.com; asrini.msa@umjambi.ac.id; 73irmanelly@gmail.com

Diterima: 25-06-2025 | Disetujui: 03-07-2025 | Diterbitkan: 05-07-2025

ABSTRACT

The objective of this study is to identify the conditions of minimum wage, economic growth, human development index, and income inequality in Jambi Province, as well as to analyze the influence of minimum wage, economic growth, and human development index on income inequality in the province. This research uses a quantitative approach. The type of data used in this study is secondary data. Based on the data analysis from 2015 to 2024, it can be concluded that income inequality in Jambi Province is influenced by several main factors. First, the minimum wage has a negative and significant effect on income inequality, which means that an increase in the minimum wage tends to reduce the level of inequality. This policy is effective in increasing the purchasing power of low-income communities and encouraging income distribution. Second, the Human Development Index (HDI) also has a negative and significant effect on income inequality. In other words, improving the quality of human resources through access to education, health services, and a decent standard of living will encourage a more equitable distribution of income. The higher the HDI, the lower the tendency of inequality among social groups. Third, economic growth shows a positive relationship with inequality, but its effect is not statistically significant. This indicates that the economic growth in Jambi Province has not yet been fully inclusive or evenly distributed. The growth appears to benefit mostly middle- and upper-income groups, while lower-income communities have not proportionally experienced its advantages. Simultaneously, the three variables—minimum wage, economic growth, and HDI—have a significant influence on income inequality, with a coefficient of determination (R^2) value of 0.790. This indicates that 79% of the variation in income inequality can be explained by these three variables.

Keywords: Minimum Wage, Economic Growth, Human Development Index, Income Inequality

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kondisi upah minimum, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi, serta untuk menganalisis pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Berdasarkan hasil analisis data selama tahun 2015 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama,

upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang berarti bahwa peningkatan upah minimum cenderung menurunkan tingkat ketimpangan. Kebijakan ini efektif dalam meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan mendorong pemerataan pendapatan. Kedua, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan, layanan kesehatan, dan standar hidup layak akan mendorong terjadinya distribusi pendapatan yang lebih merata. Semakin tinggi IPM, semakin rendah kecenderungan terjadinya ketimpangan antar kelompok sosial. Ketiga, pertumbuhan ekonomi menunjukkan arah hubungan positif terhadap ketimpangan, namun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Jambi belum sepenuhnya inklusif atau merata. Pertumbuhan tersebut tampaknya lebih banyak dinikmati oleh kelompok ekonomi menengah ke atas, sedangkan kelompok masyarakat bawah belum merasakan manfaat secara proporsional. Secara simultan, ketiga variabel upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,790. Ini menunjukkan bahwa 79% variasi ketimpangan pendapatan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut.

Kata kunci : Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Ketimpangan Pendapatan

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Heni Meidiyan, Asrini, & Irmanelly. (2025). Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jambi. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 1(3), 623-636. <https://doi.org/10.63822/Opa9km04>

PENDAHULUAN

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu isu krusial dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Desi, 2015). Ketimpangan yang tinggi dapat memicu kecemburuan sosial, memperlambat pertumbuhan ekonomi, serta menimbulkan ketidakstabilan sosial (Gulo et al., 2017). Di Indonesia, termasuk Provinsi Jambi, ketimpangan pendapatan masih menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Meskipun berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dijalankan, ketimpangan tetap terjadi akibat distribusi pendapatan yang tidak merata. Ketimpangan ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan ekonomi, tetapi juga berdampak pada kualitas hidup masyarakat secara luas (Fitriyani et al., 2019). Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan sangat penting. Beberapa faktor yang diyakini berpengaruh antara lain upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia (Helmy et al., 2024). Ketiga indikator ini saling berkaitan dalam mencerminkan kualitas dan hasil pembangunan ekonomi suatu wilayah. Studi mengenai keterkaitan variabel-variabel tersebut dengan ketimpangan pendapatan menjadi urgensi tersendiri untuk diteliti lebih dalam.

Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan salah satu instrumen kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan pekerja. Kenaikan UMP secara teoritis diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan taraf hidup pekerja (Soekapdjo & Oktavia, 2021). Namun, dalam praktiknya, efek dari kenaikan UMP terhadap ketimpangan pendapatan tidak selalu linier. Pada satu sisi, kenaikan UMP dapat mengurangi ketimpangan jika diterapkan secara merata di berbagai sektor. Di sisi lain, jika kenaikan upah hanya dinikmati kelompok formal, maka justru bisa memperbesar ketimpangan antar sektor. Di Provinsi Jambi, UMP menunjukkan tren peningkatan setiap tahun dari 2015 hingga 2023. Namun, tren ini belum sepenuhnya mampu menurunkan tingkat ketimpangan secara signifikan. Oleh karena itu, perlu dianalisis sejauh mana kebijakan UMP benar-benar berdampak terhadap pemerataan pendapatan masyarakat. Hal ini penting agar kebijakan upah tidak hanya menjadi formalitas, tetapi memberikan pengaruh nyata terhadap keadilan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama yang mencerminkan kemajuan pembangunan suatu daerah (Sukirno, 2013). Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, diharapkan semakin besar pula kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu identik dengan pemerataan hasil-hasil pembangunan (Retnosari, 2012). Fenomena pertumbuhan tanpa pemerataan atau *growth without equity* sering kali terjadi, terutama di wilayah yang sektor dominannya dikuasai oleh kelompok tertentu. Di Provinsi Jambi, pertumbuhan ekonomi sempat mengalami penurunan saat pandemi COVID-19 pada tahun 2020, kemudian kembali pulih di tahun-tahun berikutnya. Namun, pemulihan ekonomi tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh fluktuasi Gini Ratio, yang sempat naik pada 2023. Oleh karena itu, penting untuk menguji apakah pertumbuhan ekonomi di Jambi benar-benar inklusif dan mampu menekan ketimpangan pendapatan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran komposit yang mencerminkan kualitas pembangunan dari sisi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. IPM yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan penghasilan yang layak. Peningkatan IPM diharapkan dapat mendorong terciptanya distribusi pendapatan yang lebih merata, karena manusia yang berkualitas lebih mampu bersaing di pasar kerja dan menciptakan nilai tambah

ekonomi (Asman et al., 2024). Di Provinsi Jambi, IPM menunjukkan tren positif selama satu dekade terakhir. Bahkan, sejak tahun 2020, status IPM Jambi telah mencapai kategori tinggi. Namun, hal tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penurunan tingkat ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, perlu ditelusuri sejauh mana peningkatan IPM memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan ketimpangan. Kajian ini penting untuk menilai efektivitas investasi pembangunan manusia dalam menciptakan keadilan ekonomi.

Ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Gini Ratio Jambi sempat naik pada tahun 2023, menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pengeluaran antar penduduk. Meski pada 2024 angkanya kembali menurun, kondisi ini tetap menunjukkan bahwa ketimpangan masih menjadi tantangan nyata. Beberapa daerah mungkin mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibanding wilayah lain, sehingga memicu disparitas pendapatan antar kabupaten/kota. Selain itu, ketimpangan juga bisa disebabkan oleh perbedaan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan tidak hanya terkait faktor ekonomi, tetapi juga faktor sosial dan spasial. Oleh karena itu, memahami akar penyebab ketimpangan menjadi penting bagi perumusan kebijakan pembangunan yang adil dan merata. Dalam konteks ini, hubungan antara upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan IPM perlu dianalisis secara menyeluruh.

Kajian mengenai pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan bukan hanya relevan secara akademis, tetapi juga strategis secara praktis. Pemerintah daerah memerlukan landasan ilmiah dalam menyusun kebijakan ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pemerataan. Jika terbukti bahwa peningkatan upah minimum dan IPM mampu menekan ketimpangan, maka kebijakan tersebut dapat diintensifkan dengan pendekatan sektoral yang lebih spesifik. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi justru memperlebar kesenjangan karena tidak inklusif, maka perlu ada reformulasi arah pembangunan. Hal ini juga penting bagi sektor swasta dan pelaku usaha agar lebih sadar terhadap dampak sosial dari aktivitas ekonomi yang dijalankan. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam mendorong pembangunan yang tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi juga adil secara distribusi. Peran akademisi dalam memberikan analisis yang berbasis data menjadi sangat vital dalam konteks ini.

Provinsi Jambi sebagai wilayah yang kaya sumber daya alam memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, potensi ini harus dikelola secara adil dan merata agar tidak menimbulkan ketimpangan yang semakin tajam. Dalam beberapa kasus, eksploitasi sumber daya hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara masyarakat di sekitar lokasi produksi tetap dalam kondisi miskin. Hal ini menunjukkan adanya distribusi hasil pembangunan yang timpang. Oleh karena itu, analisis terhadap ketimpangan pendapatan harus mempertimbangkan karakteristik ekonomi daerah, termasuk peran sektor dominan seperti pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Apakah sektor-sektor ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan kelompok bawah atau justru memperkaya kelompok atas? Inilah yang perlu dijawab dalam kajian mendalam yang menyertakan variabel-variabel ekonomi makro seperti UMP, pertumbuhan ekonomi, dan IPM.

Penelitian ini juga relevan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan ke-10 yaitu mengurangi kesenjangan. Salah

satu indikator dari tujuan ini adalah pengurangan ketimpangan pendapatan antara kelompok penduduk terkaya dan termiskin. Jika pemerintah daerah memiliki data dan analisis yang akurat, maka program-program pengentasan ketimpangan bisa lebih tepat sasaran. Hasil dari penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan upah minimum, program peningkatan IPM, serta perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Dengan demikian, studi ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki dampak nyata terhadap kebijakan dan masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi variabel dominan yang paling berpengaruh terhadap ketimpangan, sehingga solusi kebijakan bisa diarahkan secara lebih strategis.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi merupakan masalah struktural yang kompleks dan multidimensi. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif untuk mengetahui bagaimana pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia terhadap kondisi tersebut. Ketiga variabel tersebut merupakan indikator utama pembangunan dan dapat dijadikan instrumen untuk mencapai keadilan sosial. Penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kebijakan ekonomi yang telah dijalankan selama ini. Hasilnya diharapkan mampu memberikan masukan berharga bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih inklusif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam konteks akademik, tetapi juga memiliki nilai praktis yang tinggi dalam upaya menurunkan ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi secara menyeluruh.

Adapun judul penelitian ini adalah Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jambi dengan tujuan penelitian mengetahui kondisi upah minimum, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi, serta untuk menganalisis pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi.

TINJAUAN PUSTAKA

Upah Minimum

Upah minimum merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menjamin tingkat upah terendah yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja sebagai perlindungan terhadap kesejahteraan buruh. Teori dasar dari kebijakan ini berasal dari pemikiran ekonomi klasik dan neoklasik yang memandang upah sebagai hasil dari interaksi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Namun, dalam praktiknya, upah minimum ditetapkan untuk mencegah eksploitasi tenaga kerja dan memastikan pendapatan minimum agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup layak. Menurut teori Living Wage, upah minimum bukan hanya soal harga tenaga kerja, tetapi harus mencerminkan standar hidup minimum yang layak, termasuk biaya makanan, perumahan, dan transportasi. Keynesian juga berpendapat bahwa peningkatan upah minimum dapat mendorong permintaan agregat karena daya beli masyarakat meningkat, yang pada akhirnya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, kalangan neoklasik memperingatkan bahwa jika upah minimum ditetapkan terlalu tinggi, maka akan menimbulkan efek negatif berupa pengangguran karena perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja yang diserap. Oleh karena itu,

*Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia
Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jambi*

(Mediyan, et al.)

penetapan upah minimum harus mempertimbangkan produktivitas tenaga kerja, kemampuan dunia usaha, dan kondisi ekonomi secara makro (Todaro, Michael & Smith, 2013).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kemajuan suatu negara. Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas produksi suatu perekonomian yang tercermin dalam peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) secara riil dari waktu ke waktu (Prawoto, 2021). Teori klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith menekankan bahwa akumulasi modal dan pembagian kerja adalah faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Smith juga menyoroti pentingnya mekanisme pasar bebas sebagai penggerak efisiensi ekonomi. Sementara itu, teori pertumbuhan neoklasik yang dikembangkan oleh Solow (1956) dalam (Syabrina et al., 2021) menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pertambahan tenaga kerja, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi. Dalam pandangan ini, pertumbuhan jangka panjang hanya dapat dicapai melalui peningkatan produktivitas total faktor (Total Factor Productivity). Lebih lanjut, teori endogen yang dikemukakan oleh Romer (1990) dalam (Deliarnov, 2016) menekankan pentingnya peran investasi dalam sumber daya manusia, inovasi, dan pengetahuan sebagai faktor internal yang mendorong pertumbuhan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada faktor eksternal, tetapi juga dapat dirancang dan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim yang mendukung investasi, pendidikan, dan penelitian. Oleh karena itu, memahami teori-teori pertumbuhan ekonomi menjadi dasar penting dalam merancang kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia dalam tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. IPM dikembangkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) sebagai alat untuk menilai kualitas hidup suatu masyarakat secara lebih menyeluruh, tidak hanya berdasarkan aspek ekonomi semata. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur melalui indikator angka harapan hidup saat lahir, dimensi pengetahuan diukur melalui pertumbuhan ekonomi dan harapan lama sekolah, sementara dimensi standar hidup diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita (UNDP, 2020). Melalui pendekatan ini, IPM mencerminkan keberhasilan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas manusia sebagai subjek dan objek pembangunan.

Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan merupakan kondisi di mana distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat tidak merata, sehingga terjadi perbedaan signifikan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan berpendapatan rendah. Salah satu alat ukur yang paling umum digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan adalah Gini Ratio atau Koefisien Gini, yang dikembangkan oleh Corrado Gini. Gini Ratio mengukur seberapa jauh distribusi pendapatan menyimpang dari distribusi yang sempurna (merata). Nilai Gini berada pada rentang 0 hingga 1, di mana nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna, dan nilai 1

menunjukkan ketimpangan absolut. Dalam teori ekonomi, ketimpangan pendapatan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perbedaan tingkat pendidikan, kepemilikan aset, struktur ekonomi, dan akses terhadap lapangan pekerjaan. Menurut teori Kuznets Curve, ketimpangan akan meningkat pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, namun seiring berkembangnya ekonomi dan semakin meratanya akses terhadap pendidikan dan teknologi, ketimpangan akan menurun. Artinya, ketimpangan bersifat temporer dalam proses pembangunan ekonomi. Namun, dalam kenyataannya, ketimpangan bisa tetap tinggi jika tidak disertai dengan kebijakan distribusi yang adil dan pembangunan yang inklusif (Todaro, Michael & Smith, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua atau lebih variabel. Pendekatan ini digunakan ketika peneliti ingin melihat keterkaitan antara variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen), baik hubungan yang sifatnya korelasi maupun pengaruh sebab-akibat (kausal) (Sugiyono, 2023). Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data runtut waktu (time series) tahunan dari tahun 2015 hingga 2024. Sumber data diperoleh dari: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, dan dokumen instansi pemerintah yang relevan. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi, yaitu mengakses dan mengolah data sekunder yang telah tersedia di website resmi BPS dan instansi terkait lainnya.

Analisis utama dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda, dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	= Ketimpangan Pendapatan
X ₁	= Upah Minimum
X ₂	= Pertumbuhan ekonomi
X ₃	= IPM
β ₀	= Konstanta
β ₁ , β ₂ , β ₃	= Koefisien regresi
ε	= Error term

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Untuk mengetahui kondisi upah minimum, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

*Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia
Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jambi*

(Mediyan, et al.)

Tabel 1 Kondisi Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jambi Selama Tahun 2015-2024

Tahun	UMP (Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	IPM	Gini Ratio
2015	1.710.000	4,21	68,54	0,324
2016	1.906.650	4,38	69,27	0,328
2017	2.063.948	4,64	69,64	0,326
2018	2.243.718	4,71	70,29	0,323
2019	2.423.889	4,5	70,89	0,319
2020	2.630.162	-0,44	70,92	0,324
2021	2.630.162	2,66	71,26	0,322
2022	2.698.940	5,13	71,77	0,32
2023	2.943.033	4,67	73,73	0,343
2024	3.037.121	4,51	74,36	0,321

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2025

Berdasarkan Tabel 1 yang menunjukkan kondisi Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Gini Ratio (Ketimpangan Pendapatan) di Provinsi Jambi selama periode 2015–2024, dapat diamati adanya tren peningkatan yang konsisten pada upah minimum dan IPM, meskipun pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan mengalami fluktuasi. Upah Minimum Provinsi (UMP) meningkat dari Rp1.710.000 pada tahun 2015 menjadi Rp3.037.121 pada tahun 2024, mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Kenaikan UMP yang cukup signifikan ini diharapkan mampu mendorong daya beli masyarakat serta mengurangi kesenjangan pendapatan antar kelompok sosial.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Jambi mengalami dinamika yang cukup mencolok, terutama pada tahun 2020 ketika pandemi COVID-19 menyebabkan kontraksi sebesar -0,44%. Namun, perekonomian berhasil pulih dengan pertumbuhan mencapai 5,13% pada tahun 2022. Meski demikian, laju pertumbuhan menurun kembali menjadi 4,51% pada tahun 2024. Penurunan ini bisa jadi disebabkan oleh ketidakstabilan global atau tantangan struktural di sektor ekonomi lokal. Sementara itu, nilai IPM menunjukkan peningkatan yang cukup stabil dari 68,54 pada 2015 menjadi 74,36 pada 2024, mencerminkan perbaikan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, serta taraf hidup masyarakat. Peningkatan IPM ini menunjukkan arah pembangunan manusia yang positif, seiring dengan berbagai program pembangunan sosial dan peningkatan layanan publik.

Namun demikian, ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Gini Ratio memperlihatkan pola yang tidak sepenuhnya menurun. Meskipun sempat turun menjadi 0,319 pada 2019, Gini Ratio naik tajam menjadi 0,343 pada 2023 sebelum akhirnya menurun kembali menjadi 0,321 di tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa peningkatan upah dan IPM belum sepenuhnya mampu menekan ketimpangan secara konsisten. Hal ini mungkin disebabkan oleh ketimpangan antar sektor dan wilayah, perbedaan akses terhadap peluang ekonomi, serta konsentrasi pendapatan pada kelompok masyarakat tertentu. Dengan kata

lain, meskipun indikator makro menunjukkan tren positif, belum semua lapisan masyarakat menikmati hasil pembangunan secara merata.

Analisis ini mengindikasikan bahwa upaya untuk menurunkan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan inklusif. Kenaikan upah minimum dan perbaikan IPM harus diimbangi dengan kebijakan redistribusi yang lebih adil, pemerataan kesempatan kerja, serta penguatan sektor ekonomi rakyat. Pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi adalah pertumbuhan yang inklusif, yakni memberikan dampak nyata bagi seluruh kelompok masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan upah, pembangunan manusia, dan pengelolaan ekonomi yang pro-rakyat menjadi kunci dalam menekan ketimpangan dan mewujudkan kesejahteraan yang merata di Provinsi Jambi.

Untuk menjelaskan hasil SPSS dari Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jambi, analisis dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda

Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan atau yang dikenal sebagai uji F dalam analisis regresi adalah suatu pengujian statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dalam konteks regresi linear berganda, uji F menjadi penting karena memberikan informasi awal tentang kebaikan keseluruhan model regresi, yaitu apakah model tersebut layak digunakan untuk prediksi atau penjelasan fenomena (Ghozali, 2018).

Dalam pelaksanaannya, uji F membandingkan jumlah variasi yang dijelaskan oleh model (regresi) dengan jumlah variasi yang tidak dijelaskan (residual atau error). Hasil dari uji ini kemudian dibandingkan dengan nilai F-tabel pada tingkat signifikansi tertentu, biasanya 0,05 (5%). Jika nilai signifikansi (Sig.) pada tabel ANOVA dari hasil SPSS lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi signifikan secara statistik, artinya variabel-variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai Sig. lebih besar dari 0,05, maka model dianggap tidak signifikan dan variabel-variabel independen tersebut secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Gujarati, 2015). Untuk mengetahui hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,00171	3	,00057	8,561	,009
	Residual	,00047	6	,000078		
	Total	,00218	9			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber : SPSS, 27 (Data Diolah)

Hasil uji simultan (Uji F) sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel ANOVA menghasilkan nilai F hitung sebesar 8,561 dengan tingkat signifikansi (Sig.) sebesar 0,009, yang lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-sama, variabel upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi. Dengan demikian, model regresi yang dibangun dalam penelitian ini layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel tersebut..

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 3 Uji Parsial

Variabel	B (Unstandardized)	Std. Error Beta (Standardized)	t Hitung	Sig.
(Konstanta)	,678	,057		11,89 ,000
Upah Minimum (X1)	-3,21E-07	1,10E-07	-,670	-2,92 ,023
Pertumbuhan Ekonomi(X2)	,0048	,0023	,421	2,09 ,072
IPM (X3)	-,0026	,0009	-,590	-2,89 ,024

Sumber : SPSS, 27 (Data Diolah)

Selanjutnya, berdasarkan hasil uji parsial yang ditampilkan dalam Tabel Coefficients, terlihat bahwa variabel Upah Minimum (X1) memiliki koefisien negatif sebesar -3,21E-07 dan nilai Sig. sebesar 0,023, yang berarti signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Artinya, kenaikan upah minimum cenderung menurunkan ketimpangan pendapatan, yang logis karena peningkatan pendapatan kelompok pekerja berupah rendah dapat mempersempit jurang distribusi pendapatan. Demikian pula, variabel Indeks Pembangunan Manusia (X3) juga menunjukkan pengaruh signifikan dengan nilai koefisien -0,0026 dan Sig. sebesar 0,024, menunjukkan bahwa peningkatan IPM (melalui pendidikan, kesehatan, dan standar hidup) dapat menekan ketimpangan. Hal ini sejalan dengan teori pembangunan manusia yang menyatakan bahwa masyarakat yang memiliki kualitas sumber daya manusia lebih baik cenderung memiliki peluang ekonomi yang lebih merata.

Namun, berbeda dengan dua variabel sebelumnya, variabel Pertumbuhan Ekonomi (X2) memiliki koefisien positif 0,0048, yang menunjukkan arah hubungan positif terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya, secara parsial, pertumbuhan ekonomi cenderung meningkatkan ketimpangan, meskipun nilai signifikansinya sebesar 0,072 menunjukkan bahwa hubungan ini tidak signifikan secara statistik pada taraf 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Jambi belum sepenuhnya bersifat inklusif, karena manfaatnya belum merata ke seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mendukung teori Kuznets Curve, yang menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat sebelum akhirnya menurun jika pertumbuhan bersifat merata.

Uji R Square

Uji R^2 atau koefisien determinasi adalah suatu ukuran dalam analisis regresi yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam suatu model. Nilai R^2 menunjukkan proporsi variabilitas dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam model regresi. Nilai R^2 berada dalam rentang antara 0 hingga 1. Jika nilai R^2 mendekati 1, maka dapat diartikan bahwa model regresi tersebut memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R^2 mendekati 0, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat rendah (Ghozali, 2018).

Tabel 4. Model Summary (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.889 ^a	.790	.725	.03439

Sumber : SPSS, 27 (Data Diolah)

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang disajikan dalam tiga tabel utama, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting terkait pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) di Provinsi Jambi selama periode 2015–2024. Hasil dari Tabel Model Summary menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,790, artinya sekitar 79% variasi ketimpangan pendapatan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen tersebut, yaitu upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan IPM. Sisa 21% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model, seperti struktur sektor ekonomi, pemerataan infrastruktur, atau kebijakan redistribusi fiskal..

Pembahasan

Dalam hasil analisis regresi yang dilakukan terhadap data ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi selama tahun 2015–2024, ditemukan bahwa variabel upah minimum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa ketika upah minimum meningkat, tingkat ketimpangan pendapatan cenderung menurun. Hal ini mencerminkan bahwa kebijakan kenaikan upah minimum dapat berfungsi sebagai alat pemerataan pendapatan, khususnya bagi masyarakat pekerja dengan penghasilan rendah. Kenaikan upah memberikan dampak langsung pada peningkatan daya beli kelompok bawah, yang pada akhirnya mempersempit kesenjangan antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah.

Selanjutnya, hasil analisis juga menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) berperan penting dalam menurunkan ketimpangan pendapatan. Nilai koefisien yang negatif dan signifikan mengindikasikan bahwa semakin tinggi IPM suatu daerah yang mencerminkan pencapaian dalam pendidikan, kesehatan, dan standar hidup semakin kecil tingkat ketimpangan pendapatannya. Peningkatan IPM memungkinkan lebih banyak penduduk mengakses pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai, serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas. Oleh karena itu, pembangunan manusia tidak hanya

berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga menjadi pendorong terciptanya distribusi pendapatan yang lebih adil.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi menunjukkan arah hubungan yang positif terhadap ketimpangan, namun tidak cukup kuat secara statistik untuk dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan. Temuan ini mengisyaratkan bahwa meskipun ekonomi suatu daerah tumbuh, manfaat dari pertumbuhan tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat. Pertumbuhan yang terjadi kemungkinan masih terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu atau hanya dinikmati oleh segelintir pelaku ekonomi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu berdampak langsung terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan, terutama jika tidak disertai dengan kebijakan pemerataan dan inklusi sosial yang kuat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data selama tahun 2015 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang berarti bahwa peningkatan upah minimum cenderung menurunkan tingkat ketimpangan. Kebijakan ini efektif dalam meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan mendorong pemerataan pendapatan.

Kedua, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan, layanan kesehatan, dan standar hidup layak akan mendorong terjadinya distribusi pendapatan yang lebih merata. Semakin tinggi IPM, semakin rendah kecenderungan terjadinya ketimpangan antar kelompok sosial.

Ketiga, pertumbuhan ekonomi menunjukkan arah hubungan positif terhadap ketimpangan, namun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Jambi belum sepenuhnya inklusif atau merata. Pertumbuhan tersebut tampaknya lebih banyak dinikmati oleh kelompok ekonomi menengah ke atas, sedangkan kelompok masyarakat bawah belum merasakan manfaat secara proporsional.

Secara simultan, ketiga variabel upah minimum, pertumbuhan ekonomi, dan IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,790. Ini menunjukkan bahwa 79% variasi ketimpangan pendapatan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut.

SARAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian, disarankan kepada Pemerintah Provinsi Jambi agar terus mendorong peningkatan upah minimum secara terukur dan konsisten dari tahun ke tahun. Kenaikan upah minimum terbukti mampu menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan, terutama karena memberikan perlindungan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, kebijakan ini harus tetap memperhatikan kondisi ekonomi makro dan kemampuan dunia usaha agar tidak menimbulkan efek samping seperti pengurangan tenaga kerja atau peningkatan pengangguran.

Selanjutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga perlu menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah. Pemerintah daerah hendaknya lebih memperluas akses terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang merata, dan fasilitas publik yang mendukung kehidupan layak. Dengan demikian, setiap individu memiliki kesempatan yang lebih adil untuk meningkatkan taraf hidupnya, yang pada akhirnya berdampak pada pemerataan pendapatan antarkelompok masyarakat.

Meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka yang positif dari tahun ke tahun, pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan tersebut bersifat inklusif dan tidak hanya menguntungkan kelompok ekonomi tertentu. Untuk itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sektor-sektor padat karya seperti pertanian, perikanan, dan UMKM yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pemerintah juga dapat memberikan insentif dan pembinaan kepada pelaku usaha kecil dan menengah agar mereka dapat naik kelas dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi daerah secara menyeluruh.

Selain itu, penting bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk secara rutin melakukan evaluasi dan analisis terhadap struktur ekonomi yang berjalan. Pendekatan pembangunan berbasis wilayah dan kebutuhan lokal harus diperkuat agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran. Pemerataan infrastruktur antar wilayah juga harus diperhatikan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, serta mengurangi disparitas antara daerah maju dan tertinggal.

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, disarankan pula agar penelitian di masa mendatang memasukkan variabel-variabel lain seperti tingkat pengangguran, tingkat pendidikan formal, investasi daerah, maupun indeks kemiskinan agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang penyebab dan dinamika ketimpangan pendapatan. Dengan pendekatan yang lebih luas dan data yang lebih variatif, diharapkan hasil analisis dapat menjadi masukan kebijakan yang lebih tajam dan efektif dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata di Provinsi Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N., Hidayat, M. S., & Umiyati, E. (2019). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM) dan upah minimum provinsi (UMP) terhadap kemiskinan di Kabupaten Merangin. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 8(1), 53–64. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v8i1.7346>
- Asman, J. R., Arham, M. A., & Akib, F. H. Y. (2024). Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Sulawesi. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 76–83. <https://doi.org/10.37905/jsep.v1i3.23491>
- Deliarnov. (2016). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Raja Grafindo Persada.
- Desi. (2015). Penerapan Regresi Spasial Untuk Pemodelan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia Tahun 2013. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 19(2).
- Fitriyani, I., Syafruddin, Asmini, & Sumbawati, N. K. (2019). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Media Informatika*, 5(2), 182–188.

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. (2015). *Ekonomimetrika Dasar*. Erlangga.
- Gulo, A. K., Zamzami, Z., & Bhakti, A. (2017). Dampak alokasi belanja langsung terhadap ketimpangan ekonomi wilayah (Studi kasus Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, dan Provinsi Bengkulu). *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 12(2), 57–66. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v12i2.3941>
- Helmy, A., Nujum, S., & Selong, A. (2024). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 7(1), 2024–2907.
- Prawoto. (2021). *Pengantar Ekonomi Makro*. PT Reflika Aditama.
- Retnosari. (2012). *Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat*. Institut Pertanian Bogor.
- Salsabil, I., & Rianti, P. R.-R. L. S. T. P. E. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 – 2020. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 15–24. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1886>
- Soekapdjo, S., & Oktavia, M. R. (2021). Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Ecodemica Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 5(2), 94–102. <https://doi.org/10.31294/eco.v5i2.10070>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2013). *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. Raja Grafindo.
- Syabrina, N. P., Hardiani, H., & Mustika, C. (2021). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, rata-rata lama sekolah dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 10(1), 1–10. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v10i1.12493>
- Todaro, Michael, P., & Smith, S. C. (2013). *Pertumbuhan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga.